

PENGAKTIFAN *TEMPORARY PROTECTION DIRECTIVE* (TPD) DI UNI EROPA UNTUK MENANGANI PENGUNGSI UKRAINA TAHUN 2022

Oleh: Indah Rahmadona

Pembimbing: Ahmad Jamaan, S.IP., M.Si

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Subrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Russia's invasion of Ukrainian territory in 2022 resulted in infrastructure damage and casualties that forced many of them to flee in search of safety. This caused a new problem for the European Union as an intergovernmental organization that oversees 27 European countries. Because the majority of Ukrainian refugees flee to European Union member countries that border Ukraine. As a result, there was a massive large-scale refugee movement within a short time.

The purpose of this paper is to analyze the policies taken by the European Union in dealing with Ukrainian refugees through activation Temporary Protection Directive (TPD) in 2022. This research is qualitative research with data collection sourced from journals, documents and reports from official websites, as well as news articles.

The research show that the European Union as an intergovernmental organization helps its member countries to determine policies in dealing problems in the European region, such as the refugee problem. In response to the Ukrainian refugee, European Union member countries agreed to activate the TPD. TPD helps member countries deal with refugees by formulating guidelines to help fulfilling basic matters such as eligible recipients, freedom of movement, residence permits, access to employment, access to social welfare such as housing and medical care, access to education, and family reunification opportunities.

Keyword: European Union, Temporary Protection Directive, Ukrainian Refugee.

PENDAHULUAN

The European Union (EU) atau Uni Eropa adalah serikat ekonomi dan politik yang unik antara 27 negara Eropa. EU yang ada saat ini berakar dari perjanjian-perjanjian yang ditandatangani setelah Perang Dunia Kedua. Uni Eropa berawal dari keinginan untuk memajukan kerja sama ekonomi dan dilandaskan gagasan bahwa negara yang berdagang satu sama lain menjadi saling bergantung secara ekonomi dan lebih mungkin untuk menghindari konflik.¹ Hasilnya adalah Komunitas Ekonomi Eropa yang dibentuk pada tahun 1958 dengan tujuan awal meningkatkan kerja sama ekonomi antara enam negara: Belgia, Jerman, Prancis, Italia, Luksemburg, dan Belanda.

Sejak itu, 22 negara lainnya bergabung menjadi anggota (walau kemudian Britania Raya keluar dari UE pada 31 Januari 2020) dan pasar tunggal besar yang dibuat terus berkembang. Komunitas yang dimulai sebagai serikat ekonomi murni berkembang menjadi organisasi antar-negara yang mencakup banyak kerjasama di berbagai area kebijakan yang berbeda. Mulai dari iklim, lingkungan, kesehatan, hingga hubungan eksternal dan keamanan, keadilan, dan migrasi.

Sebagai organisasi antar-negara, UE fokus menjadi lembaga yang lebih transparan dan demokratis.² Keputusan yang diambil pada tingkat UE adalah keputusan yang terbuka dan dilakukan sedekat mungkin dengan Negara Anggota. UE diatur oleh prinsip demokrasi dan didasarkan pada supremasi hukum.³ Dalam prakteknya, negara anggota menyerahkan keputusan mereka kepada Uni Eropa, sehingga keputusan akan masalah-masalah

tertentu yang menjadi kepentingan bersama dapat diputuskan secara demokratis di tingkat UE.

Salah satu permasalahan baru yang menjadi perhatian bagi Negara Anggota UE adalah kedatangan pengungsi Ukraina. Invasi Rusia pada 22 Februari 2022 tidak hanya mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa di Ukraina tetapi juga gelombang pengungsi dari Ukraina untuk mencari tempat aman. Hal ini mengakibatkan Uni Eropa harus menghadapi aliran pengungsi yang masif. Dalam waktu singkat, tercatat pada 4 Maret 2022, lebih dari 1,2 juta penduduk Ukraina telah melarikan diri ke negara-negara yang berbatasan langsung dengan Ukraina. Termasuk ke negara-negara yang merupakan negara Anggota Uni Eropa seperti Polandia, Rumania, Hungaria, dan Slovakia. Perpindahan pengungsi yang terjadi secara masif dan cepat dari Ukraina ditandai sebagai perpindahan terbesar sejak Perang Dunia Kedua di Eropa. Hampir 8 juta orang tercatat telah meninggalkan Ukraina ke wilayah Eropa lain pada awal Desember 2022 sejak invasi.⁴

Lonjakan pengungsi ini tentu menjadi permasalahan yang harus segera dibenahi. Uni Eropa sebagai organisasi antar-negara merespon dengan mengajukan proposal pengaktifkan *Temporary Protection Directive* untuk mengatasi krisis pengungsi dari Ukraina. Kebijakan yang sudah dirumuskan sejak tahun 1999 tetapi tidak pernah digunakan untuk menangani permasalahan pengungsi di Uni Eropa.

¹ European Commission. (2022). *The European Union - What it is and what it does*. Manuscript. European Union. Hlm 7

² Ibid, hlm 8.

³ Ibid, hlm 57.

⁴ IMF. (2022). *Europe Could Do Even More to Support Ukrainian Refugees*. Diakses melalui <https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/12/15/europe-could-do-even-more-to-support-ukrainian-refugees> pada 11 Oktober 2023.

KERANGKA TEORI

Keberadaan institusi internasional menjadi suatu kajian yang salah satunya dipopulerkan oleh Robert Keohane melalui institusionalisme neoliberal. Keohane mendeskripsikan institusi sebagai serangkaian aturan yang gigih dan terhubung baik secara formal dan informal untuk menentukan peran perilaku, membatasi aktivitas, dan membentuk ekspektasi.⁵

Bentuk dari Institusi internasional menurut Keohane salah satunya adalah *Formal intergovernmental* atau *cross-national nongovernmental organizations*,⁶ yang merupakan organisasi yang dibentuk oleh negara-negara dengan tujuan khusus untuk mengawasi aktivitas dan memberikan respon terhadap suatu aktivitas. Organisasi ini memiliki birokrasi yang mengatur dan memberikan tugas spesifik kepada anggota yang tergabung di dalamnya. Uni Eropa dapat diasumsikan sebagai contoh institusi internasional bentuk *Formal Intergovernmental Organizations*.

Neoliberal melihat keberadaan institusi bukan untuk membatasi negara, akan tetapi tindakan negara juga sangat bergantung pada pengaturan institusi yang berlaku.⁷ Institusionalisme neoliberal mengasumsikan bahwa negara menjadi aktor kunci dan kebijakan institusi dapat berdampak pada tindakan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang penemuannya diungkapkan melalui pengumpulan data yang berhubungan dengan topik yang

diteliti.⁸ Data yang dikumpulkan bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dokumen atau laporan resmi dari laman situs resmi Uni Eropa, dan artikel berita.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Penerimaan Pengungsi di Uni Eropa

Landasan kebijakan Uni Eropa menerima pengungsi diatur karena negara anggotanya telah menyepakati Deklarasi Hak Asasi Manusia, Konvensi Jenewa 1951, dan Protokol 1967 sehingga terikat dengan perlindungan HAM dan perlindungan pengungsi.⁹ Selain itu, negara anggota Uni Eropa seluruhnya adalah anggota PBB yang sudah meratifikasi isi dari Konvensi Jenewa, sehingga negara anggota Uni Eropa tidak bisa menolak datangnya pengungsi.

Sebagai kawasan yang terbuka menerima kedatangan pengungsi dan imigran, Uni Eropa sejak lama berada dalam situasi kesulitan dan kewalahan. Sebagai organisasi antarnegara, permasalahan pengungsi menjadi permasalahan bersama yang diselesaikan di tingkat Uni Eropa. Uni Eropa mengadopsi kebijakan imigran dan pengungsi yang diatur berdasarkan kesepakatan bersama negara anggota. Tidak terkecuali dengan pengaktifan *Temporary Protection Directive* dalam menangani kedatangan pengungsi Ukraina tahun 2022.

Prosedur Pengaktifan TPD

Pergerakan pengungsi yang masif dari Ukraina memicu Dewan Uni Eropa untuk mengaktifkan kembali *Temporary Protection Directive* setelah

⁵ Keohane, R. (2018). *INTERNATIONAL INSTITUTIONS and STATE POWER* Essay in International Relations Theory. New York: Routledge, hlm 3.

⁶ Ibid, hlm 3-4.

⁷ Ibid, hlm 2.

⁸ Bakry. (2016). *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Deepublish, hlm 27.

⁹ Pertiwi, L.A. (2016). Kompleksitas Rezim di Uni Eropa: Upaya Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(3), hlm 222.

dua dekade berlalu.¹⁰ Temporary Protection Directive pada tahun 2022 berpedoman pada isi dari *the Council Directive 2001/55/EC* yang sudah ada sejak 2001. Akan tetapi, Direktif ini seperti putri tidur karena tidak pernah dipakai untuk menangani pengungsi di Uni Eropa.

TPD pada awalnya dibuat sebagai antisipasi kedatangan pengungsi saat perang Kosovo terjadi pada tahun 1998-1999. Dan invasi Rusia di Ukraina pada 2022 menjadi momentum bagi Uni Eropa untuk kembali mengkaji *Temporary Protection Directive* sebagai model perlindungan sementara yang dapat digunakan dalam mengatasi besarnya jumlah pengungsi yang masuk dari negara lain seperti yang terjadi di Ukraina dalam waktu singkat.¹¹ Pengungsi yang masif dan cepat memaksa Uni Eropa untuk segera mengambil tindakan.

Sebagai organisasi antar-negara, keputusan untuk menyelesaikan suatu permasalahan di Uni Eropa berkaitan dengan keterlibatan lembaga di tingkat EU. Dalam prakteknya, Negara Anggota menyerahkan sebagian keputusan mereka kepada lembaga bersama yang telah mereka buat, sehingga keputusan tentang masalah-masalah tertentu yang menjadi kepentingan bersama dapat diambil secara demokratis di tingkat UE.

Prosedur pengambilan keputusan mengenai pengaktifan *Temporary Protection Directive* dimulai ketika Komisi Eropa mengusulkan proposal untuk mengaktifkan kembali TPD pada 2 Maret 2022. Pengusulan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam

seminggu invasi Rusia ke Ukraina sudah memicu lebih dari 650 ribu pengungsi.¹² UNHCR bahkan mengestimasi bahwa terburuknya lonjakan pengungsi Ukraina akan lebih dari 4 juta orang.

Menyadari adanya permasalahan yang akan segera dihadapi oleh Uni Eropa, tetapi Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menyatakan bahwa Eropa mendukung mereka yang membutuhkan perlindungan. Semua orang yang melarikan diri dari bom Putin diterima di Eropa. Dan Eropa akan memberikan perlindungan bagi mereka yang mencari perlindungan dan akan membantu mereka yang mencari jalan pulang yang aman.¹³ Pernyataan Presiden Komisi Eropa ini menyiratkan bahwa Uni Eropa menyambut positif kedatangan para pengungsi dari Ukraina.

Berselang dua hari sejak diusulkannya proposal pengaktifan TPD, pada 4 Maret 2022, Negara Anggota menyetujui untuk mengimplementasikan TPD. Sehingga, Dewan Uni Eropa selanjutnya mengumumkan bahwa Uni Eropa akan menjadikan TPD sebagai pedoman untuk mengatasi permasalahan pengungsi dari Ukraina di Uni Eropa. Setelah disetujui oleh Dewan, maka proposal TPD memiliki jenis hukum sebagai direktif.

Sebagai direktif, maka TPD mengharuskan Negara Anggota untuk mengadopsi TPD ke dalam hukum

¹⁰ Küçük, E. (2023). Temporary Protection Directive: Testing New Frontiers?. *European Journal of Migration and Law*, 25(1), hlm 2

¹¹ Carrera, S. (2022). Ineli Ciger, M., Vosyliute, L., & Brumat, L. (2022). The EU grants temporary protection for people fleeing war in Ukraine: time to rethink unequal solidarity in EU asylum policy. *CEPS Policy Insights*, 09, hlm 9.

¹² European Commission. (2022). Ukraine Refugees: Operational guidelines to support Member States in applying the Temporary Protection Directive. Diakses melalui https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/news/ukraine-refugees-operational-guidelines-support-member-states-applying-temporary-protection-2022-03-18_en pada 9 September 2023.

¹³ European Commission. (2022). Ukraine: Commission proposes temporary protection for people fleeing war in Ukraine and guidelines for border checks. Diakses melalui https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1469 pada 9 September 2023.

nasional mereka.¹⁴ Akan tetapi, Negara Anggota dapat menentukan sendiri bagaimana cara menerapkan langkah-langkah untuk menerapkan TPD. Dan dengan demikian, Negara Anggota harus memenuhi kewajiban mereka terhadap orang-orang yang menerima perlindungan sementara.

Alasan Pengaktifan *Temporary Protection Directive*

Gelombang krisis pengungsi di Uni Eropa juga pernah terjadi pada tahun 2014 akibat peningkatan jumlah pengungsi yang datang melalui Laut Mediterania melalui wilayah Turki. Hal ini dikarenakan adanya fenomena *Arab Spring* yang mengakibatkan gejolak kondisi politik di kawasan Timur Tengah. Transisi politik yang menyebabkan demonstrasi untuk menggulingkan rezim pemerintahan. Perang sipil seperti yang mengakibatkan konflik berkepanjangan dan memaksa banyak orang untuk memilih mengamankan dirinya dan berlindung mencari tempat baru yang aman seperti Uni Eropa.

Gelombang pemohon pengungsi di Uni Eropa pada saat itu membuat negara-negara Uni Eropa kesulitan akibat kurangnya persiapan. Kebijakan *Common European Asylum System* (CEAS) digunakan untuk menangani permohonan suaka di Uni Eropa. Alur penerimaan permohonan pengungsi dengan penerapan CEAS sangat panjang. Hal ini dikarenakan dengan penerapan CEAS, maka pemohon suaka yang sudah diterima menurut alur penerimaan pengungsi dapat menetap di negara anggota yang menerima dan mendapatkan hak-haknya sebagai pengungsi karena menerima perlindungan internasional.

Berbeda dengan alur penerimaan pengungsi sebelumnya, penerapan TPD pada tahun 2022 memberikan kelonggaran pada negara anggota untuk memproses pengaplikasian dan verifikasi pada permohonan permintaan pengungsi Ukraina. Ketentuan penetapan TPD sebagai aturan yang digunakan untuk mengatasi gelombang pengungsi Ukraina adalah karena adanya gelombang pengungsi yang masif dan cepat. Akibatnya, Penerapan TPD dipilih untuk mempermudah proses masuk gelombang pengungsi untuk menerima perlindungan segera dan kolektif tanpa perlu mempertimbangkan permohonan individu.¹⁵ Sehingga, proses penerimaan pengungsi dari Ukraina ini tidak akan melalui proses formalitas yang panjang dan membebankan sistem suaka.

Para pengungsi akibat perang dari Ukraina dapat memilih untuk menetap di negara anggota Uni Eropa sesuai pilihan mereka, bukan menunggu untuk mengetahui negara anggota mana yang mau menerima mereka. Selain itu, Uni Eropa juga menerima pengungsi Ukraina dengan mudah karena adanya pembebasan visa bagi Ukraina untuk masuk ke Uni Eropa. Hal ini membuat kedatangan pengungsi dari Ukraina lebih dapat diterima. Selain itu, dengan penerapan TPD, pengungsi Ukraina sudah dipastikan harus kembali ke negara asalnya ketika TPD dinyatakan usai. Karena penerapan TPD hanya berlaku untuk satu tahun dan diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para negara anggota.

Walau demikian, TPD selaras dengan ketentuan kebijakan yang ada dalam bidang kebijakan pengungsi di UE Proposal ini sepenuhnya konsisten

¹⁴European Commission. (2022). Proposal for a Council Implementation Decision, hlm 2. Diakses melalui <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0091>

¹⁵ Kuzmenko, O., Ryndiuk, V., Kozhura, L., Chorna, V., & Tytykalo, R. (2023). Legal aspects of temporary protection for Ukrainians in the member states of the European Union. *Juridical Tribunal*, 13, hlm 232.

dengan kebijakan suaka UE karena TPD merupakan bagian integral dari CEAS dan dirancang untuk menghadapi situasi luar biasa aliran masif pengungsi seperti yang akibat invasi Rusia ke Ukraina. Ini juga sepenuhnya konsisten dengan tujuan Uni Eropa untuk mendirikan wilayah kebebasan, keamanan, dan keadilan terbuka bagi mereka yang karena keadaan mencari perlindungan internasional di Uni Eropa.

Temporary Protection Directive

Temporary Protection Directive didefinisikan sebagai prosedur luar biasa yang diberikan karena adanya gelombang besar pengungsi dari negara ketiga yang akan memerlukan perlindungan segera dan mereka tidak dapat kembali ke negara asalnya.¹⁶ Mekanisme TPD mempermudah proses masuknya gelombang pengungsi karena bertujuan untuk menerima perlindungan segera dan kolektif tanpa perlu mempertimbangkan permohonan individu.¹⁷

Rancangan TPD digunakan untuk mengupayakan keseimbangan dalam mengelola bersama pengungsian intra-Eropa, dengan memberikan perlindungan langsung kepada orang yang melarikan diri dari perang. Kesepakatan dalam pengimplementasian TPD didasarkan pada keinginan Negara Anggota dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi Ukraina secara kolektif. TPD berguna untuk menghindari sistem suaka Negara-Negara Anggota menjadi terlalu terbebani.¹⁸ Hal ini dikarenakan, proses penerimaan pengungsi Ukraina menjadi lebih cepat akibat penyederhanaan formalitas.

Ketentuan yang termasuk dalam TPD dan tindakan nasional yang diimplementasikan akan memungkinkan Negara-Negara Anggota mengelola aliran pengungsi dari Ukraina secara terkendali dan efektif. Penerapan TPD juga menguntungkan Negara-Negara Anggota terkait dengan aliran masif yang dapat memberatkan sistem suaka Negara-Negara Anggota, dengan mengurangi formalitas menjadi minimum karena urgensi situasi. Selain itu, ini pemberian hak-hak untuk para pengungsi dapat diberikan secepatnya dengan disesuaikan aturan masing-masing negara anggota.

Perlindungan sementara akan memungkinkan Negara-Negara Anggota untuk siap menghadapi aliran pengungsi dari Ukraina yang mencari perlindungan internasional saat ini dan yang akan datang. Hal ini juga akan memungkinkan Negara-Negara Anggota untuk menangani orang-orang Ukraina yang memiliki keuntungan dari perjalanan bebas visa, akan mencari bentuk status lain setelah 90 hari masa tinggal legal di Uni Eropa berakhir. Oleh karena itu, proposal ini juga menanggapi panggilan dari Dewan untuk siap siaga serta bagian dari respon Uni Eropa terhadap intervensi militer Rusia di Ukraina.

Terakhir namun tidak kalah penting, ketentuan dalam instrumen TPD mempromosikan keseimbangan upaya antara Negara-Negara Anggota yang menanggung konsekuensi menerima pengungsi dari Ukraina. Warga negara Ukraina, sebagai pelancong bebas visa, akan dapat bergerak bebas di seluruh UE setelah diterima ke dalam wilayah, memungkinkan mereka bergabung dengan keluarga dan teman-teman diaspora signifikan yang saat ini ada di seluruh Uni Eropa, dan dengan demikian memfasilitasi keseimbangan upaya antara Negara-Negara Anggota. Hal ini

¹⁶ Council Directive/2001/55/EC of 20 July 2001, Article 2 (a).

¹⁷ Kuzmenko, O., et al. (2023). Op. Cit.

¹⁸ Ibid.

akan membantu Uni dan Negara-Negara Anggotanya untuk memastikan manajemen yang efisien dan terkendali aliran pengungsi dari Ukraina di dalam Uni Eropa pada saat terjadi kedatangan massal.

Perlindungan sementara dianggap sebagai instrumen yang tepat dalam situasi yang terjadi pada pengungsi Ukraina. Mengingat skala aliran masif yang terjadi, Negara Anggota Uni Eropa harus dengan cepat memberikan hak-hak yang diselaraskan bagi pengungsi Ukraina di seluruh UE. Komisi Eropa pada 21 Maret 2022 menerbitkan panduan operasional TPD untuk lebih memperjelas direktif dalam memberikan perlindungan sementara.

Berikut ini adalah 8 hal pokok yang diatur dalam TPD untuk diimplementasikan Negara Anggota:¹⁹

1) Cakupan Penerima TPD

Berdasarkan TPD Pasal 2(1) dan 2(2), Negara Anggota UE hanya menerima kelompok tertentu sebagai penerima perlindungan sementara. Dalam pedoman operasional yang dibuat untuk pengungsi ukraina, cakupan penerima TPD adalah Yaitu a) Warga negara Ukraina yang menjadi pengungsi pada atau setelah 24 Februari 2022 dan anggota keluarganya, b) orang tanpa kewarganegaraan dan warga negara ketiga selain Ukraina yang menerima perlindungan internasional atau perlindungan nasional di Ukraina sebelum tanggal 24 Februari 2022 dan terpaksa meninggalkan Ukraina setelah 24 Februari 2022 beserta keluarganya.

2) Kebebasan Bergerak

¹⁹ Communication from the Commission on Operational guidelines for the implementation of Council implementing Decision 2022/382 establishing the existence of a mass influx of displaced persons from Ukraine within the meaning of Article 5 of Directive 2001/55/EC, and having the effect of introducing temporary protection 2022/C 126 I/01. Diakses melalui bit.ly/3TwXYbE

Pasal 8(3) menjelaskan bahwa sebelum penerbitan izin tinggal, Negara-negara Anggota harus memberikan fasilitas prasarana kepada orang yang berhak atas perlindungan sementara atau perlindungan memadai berdasarkan hukum nasional untuk memperoleh visa yang diperlukan, termasuk visa transit, agar dapat diterima di wilayah mereka.

3) Ketersediaan Informasi Terkait TPD

Penyediaan informasi dalam dokumen/brosur Berdasarkan Pasal 9 Direktif 2001/55/EC, Negara-negara Anggota harus menyediakan informasi dalam bahasa yang dipahami. Informasi relevan yang berkaitan dengan perlindungan sementara yang dijelaskan secara jelas (manfaat yang ditetapkan, hak, dan kewajiban yang berasal dari perlindungan sementara).

4) Izin tinggal selama masa perlindungan

Pada pasal 8 TPD, dijelaskan bahwa negara anggota harus memberikan izin tinggal selama periode perlindungan dan mengeluarkan dokumen atau bukti izin tinggal sesuai dengan Pasal 8(1) Direktif 2001/55/E.

5) Akses terhadap pekerjaan dan kebijakan pasar tenaga kerja nasional serta kondisi kerja secara umum

Pasal 12 TPD membahas bahwa negara anggota harus memberikan wewenang penerima TPD untuk terlibat dalam kegiatan seperti bekerja, juga kesempatan untuk pelatihan kejuruan dan pengalaman kerja praktis.

6) Akses terhadap akomodasi atau perumahan yang sesuai, untuk kesejahteraan sosial; akses terhadap perawatan medis

Pasal 13 ayat 1 dijelaskan bahwa Negara Anggota harus menjamin bahwa penerima TPD mempunyai akses terhadap akomodasi dan sarana untuk memperoleh rumah. Pada ayat 2

dijelaskan bahwa negara membuat ketentuan untuk penerima TPD agar mendapat bantuan sosial serta perawatan medis.

- 7) Akses pendidikan bagi anak di bawah 18 tahun pada sistem pendidikan negara

Berdasarkan Pasal 14(1) Direktif 2001/55/EC, Negara-negara Anggota harus memberikan akses ke sistem pendidikan mereka kepada orang di bawah usia 18 tahun yang menikmati status perlindungan sementara dengan kondisi yang sama dengan warga negara mereka sendiri. Komisi menganggap bahwa hal yang sama berlaku untuk anak-anak di bawah umur yang mendapatkan perlindungan memadai berdasarkan hukum nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 2(2) Keputusan Dewan. Jika diperlukan, dokumen yang menunjukkan tingkat pendidikan yang telah dicapai di Ukraina (misalnya, kelulusan sekolah menengah, level A1 dalam bahasa Inggris) harus dipertimbangkan.

Pedoman Komisi Eropa juga menyebutkan bahwa Negara-negara Anggota seharusnya mendukung akses ke pendidikan anak usia dini dan perawatan, serta pelatihan kejuruan, dengan kondisi yang sama dengan warga negara mereka sendiri dan warga Uni lainnya. Khususnya, di Negara-negara Anggota di mana ada hak legal untuk pendidikan anak usia dini dan perawatan atau di mana partisipasi dalam pendidikan anak usia dini dan perawatan bersifat wajib, akses ke pendidikan anak usia dini dan perawatan untuk anak-anak yang dicakup oleh Keputusan Dewan harus disediakan dengan kondisi yang sama seperti warga negara negara tuan rumah.

- 8) Kesempatan Reunifikasi Keluarga

Pasal 15 dari Direktif 2001/55/EC membahas tentang reunifikasi anggota keluarga yang

menikmati perlindungan sementara di berbagai Negara Anggota (ayat 2), pertimbangan terbaik untuk kepentingan seorang anak (ayat 4), solidaritas dalam hal transfer untuk tujuan reunifikasi keluarga (ayat 5), penerbitan dan penarikan dokumen setelah reunifikasi (ayat 6), dan kerjasama akan pertukaran informasi (ayat 6 dan 7) berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Uni Eropa sebagai organisasi antar-negara di Eropa berperan dalam membuat kebijakan untuk menangani permasalahan seperti pengungsi Ukraina. Pengaktifan *Temporary Protection Directive* disepakati sebagai kebijakan yang digunakan dalam menerima pengungsi Ukraina. Penerapan TPD pada tahun 2022 memberikan kelonggaran pada negara anggota untuk memproses pengaplikasian dan verifikasi pada permohonan permintaan pengungsi Ukraina. Penetapan TPD mempermudah dan mempercepat proses masuk gelombang pengungsi untuk menerima perlindungan segera dan kolektif tanpa perlu mempertimbangkan permohonan individu. Selain itu, TPD memberikan kemudahan bagi negara anggota untuk memberikan hak-hak kepada penerima manfaat TPD sesuai dengan pedoman.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry. (2016). *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Carrera, S., INELI CIGER, M., Vosyliute, L., & Brumat, L. (2022). The EU grants temporary protection for people fleeing war in Ukraine: time to rethink unequal solidarity in EU asylum policy. *CEPS Policy Insights*, 09, 1-33.

- Communication from the Commission on Operational guidelines for the implementation of Council implementing Decision 2022/382 establishing the existence of a mass influx of displaced persons from Ukraine within the meaning of Article 5 of Directive 2001/55/EC, and having the effect of introducing temporary protection 2022/C 126 I/01. Diakses melalui bit.ly/3TwXYbE
- Euro News. (2022). Eu countries agree to host Ukrainian refugees under exceptional protection scheme. Diakses secara daring melalui <https://www.euronews.com/my-europe/2022/03/03/eu-countries-agree-to-trigger-a-never-used-law-to-host-ukrainian-refugees>
- European Commision. (2022). The European Union - What it is and what it does. Manuscript. European Union. Diakses melalui <https://op.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/en/>
- European Commision. (2022). Proposal for a Council Implementing Decision. Diakses melalui <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0091>
- European Commission. (2022). Ukraine Refugees: Operational guidelines to support Member States in applying the Temporary Protection Directive. Diakses melalui https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/news/ukraine-refugees-operational-guidelines-support-member-states-applying-temporary-protection-2022-03-18_en pada 9 September 2023.
- IMF. (2022). Europe Could Do Even More to Support Ukrainian Refugees. Diakses melalui <https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/12/15/europe-could-do-even-more-to-support-ukrainian-refugees> pada 11 Oktober 2023
- Kuzmenko, O., Ryndiuk, V., Kozhura, L., Chorna, V., & Tytykalo, R. (2023). Legal aspects of temporary protection for Ukrainians in the member states of the European Union. *Juridical Tribunal*, 13, 224-240.
- Küçük, E. (2023). Temporary Protection Directive: Testing New Frontiers?. *European Journal of Migration and Law*, 25(1), 1-30. <https://doi.org/10.1163/15718166-12340142>
- Keohane, R. (2018). INTERNATIONAL INSTITUTIONS and STATE POWER Essay in International Relations Theory. New York: Routledge
- Pertiwi, L.A. (2016). Kompleksitas Rezim di Uni Eropa: Upaya Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(3), 218-233.
- University of British Columbia. (n.d). The 2015 European Refugee Crisis. Diakses melalui <https://cases.open.ubc.ca/the-2015-european-refugee-crisis/>